

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup secara ekonomi masyarakat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi kerana rendahnya pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Kurniawan, 2018).

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu (Badan Pusat Statistik ,2016).

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali di jumpai dalam kehidupan bersosial. kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas,2002) dalam (Sudirman dan Lili Andriani, 2017)

b. Indikator-Indikator Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) individu yang dapat dikategorikan miskin mempunyai beberapa indikator, antara lain:

- 1) Secara umum tidak memiliki faktor produksi material dan nonmaterial. Faktor produksi material meliputi tanah, modal finansial, dan sesuatu dalam bentuk fisik lainnya, sedangkan faktor produksi nonmaterial meliputi kompetensi terapan individu dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Tertutup kemungkinan bagi seorang individu untuk memperoleh aset produksi dengan sendiri, keterbatasan yang dimiliki individu tersebut menjadi kendala dalam memenuhi syarat dalam memperoleh aset produksi yang diharapkan, sehingga akses untuk memperoleh bantuan terlampau sulit diperoleh.
- 3) Tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan seseorang bisa diperoleh dari keadaan keluarga yang sebelumnya miskin sehingga kemungkinan yang terjadi aksesibilitas individu tersebut untuk memperoleh jenjang pendidikan yang cukup juga terbatas.
- 4) Mayoritas individu miskin tinggal di pedesaan, keterbatasan lapangan kerja di pedesaan membuat kondisi ekonomi individu tersebut sulit berkembang, mengingat tidak semua penduduk di pedesaan memiliki tanah pertanian sehingga penduduk desa lainnya menjadi buruh tani, kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan mayoritas penduduk desa terkurung dalam kondisi miskin.

c. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Bappenas (2011) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan dari 2 macam berikut ini :

1) Kemiskinan kultural.

Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor- faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

2) Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, oleh karena itu mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membesakan diri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu :

1) Pendidikan yang Terlampau Rendah Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau

keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

- 2) Malas Bekerja Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
- 3) Keterbatasan Sumber Alam Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
- 4) Terbatasnya Lapangan Kerja Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
- 5) Keterbatasan Modal Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- 6) Beban Keluarga Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Kuncoro (1997), mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi, sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kemiskinan secara mikro karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang berakibat distribusi pendapatan tidak merata, rata-rata penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya pun rendah.
- 2) Adanya kemiskinan disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM), jika sumberdaya manusia rendah maka tingkat produktifitasnya pun akan rendah dan membuat pendapatan rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, adanya diskriminasi dan faktor keturunan.
- 3) Faktor penyebab kemiskinan lainnya yaitu tingkat perbedaan akses modal dalam masyarakat.

d. Ukuran Kemiskinan

Arsyad (1999) menjelaskan 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1) Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang lain dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ditemukan tingkat pendapatan minimum yang digunakan sebagai pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau biasa disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, namun juga dipengaruhi oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

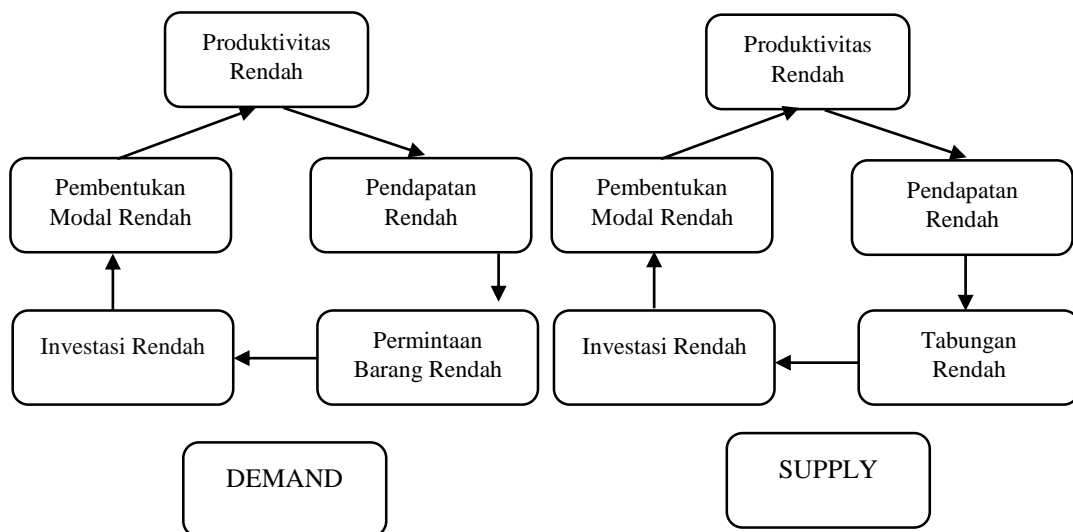
Kemiskinan relatif ini merupakan konsep perbaikan dari kemiskinan absolut, dimana kemiskinan itu akan selalu ada. Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tidak selalu berarti tidak miskin. Beberapa ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dari keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih termasuk golongan miskin. Hal itu terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari lingkungan orang yang bersangkutan

Ragnar Nurkse (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya

tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan dan begitu seterusnya.

Lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of poverty) adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu Negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Gambar 2.1
Lingkaran Setan



Sumber : Ragnar Nurkse (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006)

Dari sisi supply yaitu : Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi. Modal tersebut berasal dari utang luar negeri. Dari sinilah maka pemerintah terjebak dari teori itu. Dengan alasan tidak memiliki modal rupiah atau devisa, maka pemerintah melakukan utang luar negeri. Dalam wacana

selanjutnya berdasar pengalaman negara-negara sedang berkembang muncul teori mengkoreksinya.

Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi supply yaitu dengan meningkatkan produktifitas yang rendah tersebut sehingga penghasilan yang mereka dapat bisa meningkat, dengan meningkatnya penghasilan maka sebagian dari penghasilan tersebut dapat mereka tabung, dengan menabung maka investasi akan meningkat dan modal akan menjadi efisien (tidak boros).

Dari sisi demand yaitu: berawal dari pendapatan yang rendah sehingga berdampak kepada penawaran yang rendah, maka investasi menjadi menurun sehingga modal tidak efisien. Hal ini berdampak kepada produktifitas yang rendah.

Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi demand yaitu dengan meningkatkan pendapatannya. Hal ini akan berdampak kepada permintaan meningkat dan investasi juga meningkat maka modal menjadi efisien. Dengan demikian produktifitas dapat meningkat.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (BPS, 2017). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah

yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut (Alhudori,2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2006). IPM menurut BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Kesehatan datang sebagai konsep dari bagian modal manusia sebagai bukti dampak panjang pada pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi di Inggris 200 tahun terakhir (Hafner & Mayer-Foulkes 2013).

Dalam pembangunan manusia terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama (UNDP, 1995:118), yaitu:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya peningkatan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atau kesejahteraan yang berjalan di suatu daerah berdasarkan komponen dasar kualitas hidup, pengukuran indeks ditunjukkan melalui angka kesehatan, pendidikan, dan hidup layak (Badan Pusat Statistik). Pembangunan manusia dapat diartikan juga sebagai pembangunan kemampuan manusia dengan cara meningkatkan kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan manusia itu sendiri.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, yang mana angka harapan hidup ini mempersentasikan berapa jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat disuatu daerah dengan melihat informasi angka kelahiran dan kematian. IPM mengukur dimensi pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk (Alhudori, 2017).

Lalu untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi pendidikan ini sangat penting dan merupakan salahsatu upaya untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) atau generasi generasi masa depan yang berkualitas disuatu negara atau daerah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli yang mana dilihat dari tingkat konsumsi mastyarakat disuatu negara atau daerah disetor tertentu yang yang disesuaikan dengan indeks PPP (purchasing power charity).

3. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Upah minimum merupakan salah satu penerimaan berupa imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas persetujuan undang-undang serta suatu perjanjian antara pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan, untuk karyawan maupun keluarganya. Jadi upah adalah imbalan yang diberikan pengusaha kepada seseorang atas usaha yang telah dikerjakan (Sumarsono 2003).

Tujuan menetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja (Kaufman, 2000) dalam (Kurniawan, 2018). Upah minimum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah minimum regional Upah minimum regional adalah upah pokok dan tunjangan bagi pekerja tingkat paling rendah dan masa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di daerah tertentu.
- 2) Upah minimum sektoral Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam satu Provinsi berdasarkan kemampuan setiap sektor.

4. Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Pengertian umum pendapatan diartikan sebagai hasil pencarian usaha atau hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono, 1992). Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi (Winardi, 1992)

Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2006).

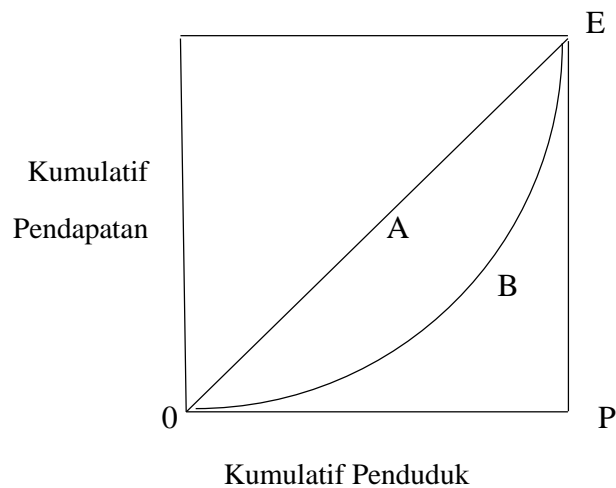
Teori yang diungkapkan Simon Kuznets yang menjelaskan siklus distribusi pendapatan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (tidak merata), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan pada fase selanjutnya cenderung membaik (ketidakmerataan menyusut). Namun dalam pemahaman ekonomi kontemporer teori yang diungkapkan Kuznets tersebut tidak begitu dapat menjelaskan kondisi sesungguhnya karena meskipun siklus itu terjadi semua tetap tergantung pada proses pembangunan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan (Todaro, 2006).

Kondisi ketimpangan pendapatan menyebabkan perbedaan pendapatan yang terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan faktor produksi terutama kepemilikan modal. Keadaan suatu wilayah mempunyai pengaruh yang besar untuk terciptanya pola pembangunan ekonomi, ketidaksamaan ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk berkembang yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pendapatan maupun pembangunanyang terjadi di Indonesia.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz. Ide dasar perhitungan Gini Ratio sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.

GAMBAR 2.2

Kurva Lorenz



Sumber : Todaro (2006)

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif dan diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz di tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sisi vertikalnya menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi horisontalnya menggambarkan persentase kumulatif populasi.

B. Pengaruh Variabel Independent terhadap Variabel Dependent

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik memiliki presentase penduduk miskin yang rendah serta memiliki jumlah penduduk miskin yang sedikit. Akan tetapi, jika suatu daerah mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang rendah maka kemiskinan akan meningkat pada daerah tersebut. Sehingga indeks pembangunan manusia merupakan variabel penting dalam pengentasan kemiskinan (Kurniawan, 2018).

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per01/Men/1999 dalam Sudirman dan Andriani (2017) upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap yakni suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi tertentu.

Upah minimum berguna untuk mengangkat derajat masyarakat yang pendapatannya rendah. Semakin meningkat tingkat upah minimum, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan dapat terbebas dari kemiskinan (Kurniawan, 2018).

3. Pengaruh Gini Ratio terhadap Kemiskinan

Berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan, terutama di negara yang sedang berkembang. Melalui pembahasan mengenai masalah ketidakmerataan dan penghapusan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan pedesaan, pendidikan, pengangguran, dan sebagainya. Cara yang sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan yaitu dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi (Lincoln Arsyad, 1997).

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi masyarakat yang sangat miskin. Sebagian keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian berada di bawah garis kemiskinan, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2006)

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan diberbagai wilayah oleh sejumlah peneliti dengan daerah/wilayah dan periode waktu yang berbeda-beda pula, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Acep Kurniawan (2018) yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat”. Jenis penelitiannya bersifat kuantitatif yaitu mengambil data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jawa Barat dengan data time-series yaitu tahun 2011-2016. Data yang diambil adalah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum dari berbagai Kota dan Kabupaten. Kemudian untuk metode pengolahan data serta analisisnya menggunakan metode regresi data panel yang dibantu oleh program EVIEWS 8. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan variabel independen yang terdiri dari IPM, pengangguran, dan upah minimum. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) yang berjudul “Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi” bertujuan untuk seberapa besar variabel Indeks Pembangunan Manusia, pdrb dan Jumlah Pengangguran . Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan Jumlah Pengangguran memiliki hubungan positif terhadap penduduk miskin, tetapi PDRB memiliki hubungan negatif terhadap penduduk miskin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Wahyu Puspita (2015) yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk determinan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai 2012 . Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa pengaruh pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi penduduk Jawa Tengah signifikan. Artinya berpengaruh pada kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, Rosalia Natalia Seleky (2015) yang berjudul “Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro” bertujuan untuk untuk mengidentifikasi kemiskinan terjadi di pedesaan Bojonegoro dan, untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di antara mereka. Penelitian ini dilakukan di daerah pedesaan di Kabupaten Bojonegoro, dan ada 60 rumah tangga pedesaan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa tingkat kemiskinan cukup rendah. Skor 'kedalaman kemiskinan' diukur oleh Indeks FGT adalah 0,05, sedangkan skor 'keparahan kemiskinan' adalah 0,02. Selanjutnya, pendapatan didistribusikan secara tidak merata di antara rumah tangga pedesaan ditunjukkan oleh indeks Gini 0,459.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Gek Ayu Nina dan Surya Dewi Rustariyuni (2018) yang berjudul “Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali” tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1) untuk menganalisis pengaruh rasio gini, bukan makanan pengeluaran per kapita, dan belanja modal untuk

kemiskinan di kabupaten / kota BaliPropinsi; 2) Untuk menganalisis pengaruh rasio gini, pengeluaran non-makanan per kapita belanja modal dan kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat di kabupaten / kota BaliPropinsi; dan 3) Untuk menganalisis pengaruh rasio gini, pengeluaran non-makanan per kapita dan belanja modal melalui kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat di kabupaten / kota Indonesia Provinsi Bali. Teknik analisis menggunakan analisis jalur dan hasil rasio Gini, belanja modal dan pengeluaran non-makanan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada jumlah orang miskin sedangkan. Hasil pengujian Rasio Gini variabel kesejahteraan masyarakat, rasio ini, pengeluaran non-makanan, dan jumlah orang miskin memiliki efek positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sementara belanja modal memiliki tidak ada pengaruh.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyati Dan David K (2017) yang berjudul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu lima tahunan 2011 -2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji regresi. Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mona Adriana (2016) yang berjudul “Determinants of Poverty: Panel Data Analysis in Asean-5; 1990 – 2013”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel makroekonomi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat pengangguran, dan juga variabel sosial, seperti total populasi dan tingkat melek huruf kaum muda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Publikasi Bank Dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan menggunakan analisis data panel dan STATA 11. penelitian ini menggunakan kombinasi deret waktu dan penampang, itulah sebabnya kami dapat menggunakan analisis data panel.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Indunil de Silva and Sudarno Sumarto (2014) dengan judul “Dynamics of Growth, Poverty and Human Capital: Evidence from Indonesian Sub-National Data.” Tujuan dari penelitian ini ada dua. Pertama, terlepas dari literatur empiris yang luas tentang pengujian model neoklasik pertumbuhan ekonomi menggunakan data lintas negara, sangat sedikit studi yang ada di tingkat daerah. Kami berusaha untuk mengisi kesenjangan ini dengan menggunakan data panel selama periode 2002-2012, persamaan pertumbuhan neoklasik yang dimodifikasi, dan penaksir panel dinamis untuk menyelidiki pengaruh modal kesehatan dan pendidikan terhadap ekonomi pertumbuhan dan kemiskinan di tingkat kabupaten di Indonesia. Kedua, sementara kebanyakan studi lintas negara ada cenderung berkonsentrasi hanya pada pendidikan sebagai ukuran modal manusia, kami memperluas analisis dan penyelidikan efek dari modal kesehatan juga.
9. Penelitian ini dilakukan oleh Suwandi (2016) dengan judul “The Influence of Economic Growth on Poverty, Investment, and Human Development Index in

Fak, Fak District, West Papua Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tidak langsung pada peningkatan penyerapan investasi dan penurunan kemiskinan. Selain itu, kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung pada peningkatan investasi, serta secara langsung mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan analisis kuantitatif uji parsial. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta untuk meningkatkan IPM, ini adalah apa yang harus dilakukan (a) revitalisasi pertanian untuk membantu sektor utama kabupaten Fak Fak (pertanian); (B) memberikan modal seperti: pinjaman lunak perbankan dengan syarat mudah dan dana bergulir untuk target yang tepat dalam bentuk natura (sapi, domba, dll) yang dapat mempercepat peningkatan ekonomi; (c) pemerintah daerah memfasilitasi hubungan dan program kemitraan dengan konsep "win-win solution".

10. Penelitian ini dilakukan oleh S. Annim, S Mariwah dan J. Sebu (2012) dengan judul “Spatial inequality and household poverty in Ghana”. Pertama kita menguraikan ketimpangan menggunakan distrik administratif sebagai unit analisis untuk memeriksadi dalam dan di antara kontribusi terhadap ketimpangan nasional. Kedua, kami memeriksa tren ketidaksetaraan di satu-satunya wilayah (Timur) Ghana yang mengalami pengurangan ketidaksetaraan selama periode 1991-2006; dan, akhirnya, kami menyelidiki hubungannya antara ketimpangan tingkat kabupaten dan kemiskinan rumah tangga. Tiga putaran terakhir Survei Standar Hidup Ghana digunakan untuk analisis kami.

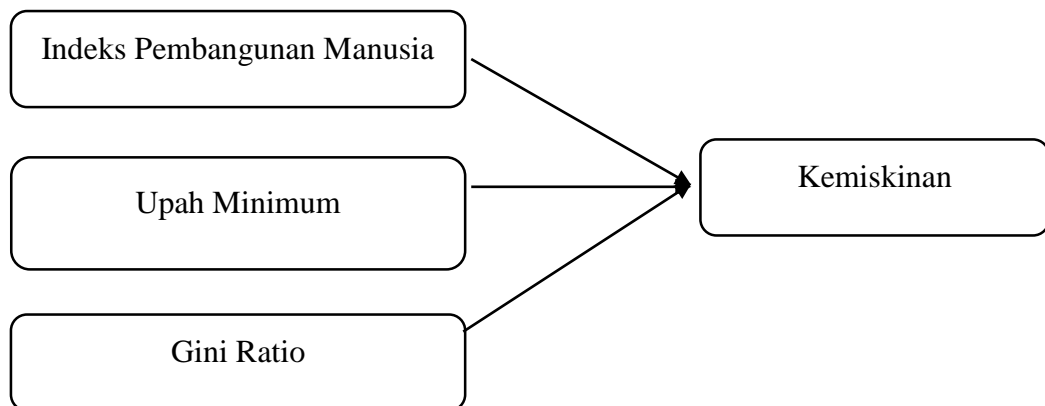
Kami mengamati bahwa kontribusi dalam ketimpangan kabupaten lebih tinggi daripada ketimpangan antar kabupaten. Ini Pola diamati untuk klasifikasi geografis lainnya, seperti desa-kota, ekologiszona dan wilayah. Di wilayah Timur Ghana, di mana ketimpangan secara keseluruhan berkurang periode 1998 hingga 2005, ini bukan kasus untuk sekitar 50 persen dari kabupaten di Indonesia wilayah. Akhirnya, ketimpangan tingkat kabupaten menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga, tetapi dengan berbagai tanda, tergantung pada keadaan aktivitas ekonomi dari unit analisis (Kabupaten) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan. Kami merekomendasikan bahwa pelaksana kebijakan tingkat distrik harus ditugaskan dengan tanggung jawab meminimalkan ketidaksetaraan di dalam distrik mereka dan karenanya ketidaksetaraan keseluruhan di Ghana. Juga, kemiskinan strategi pengurangan harus mempertimbangkan kemiskinan tingkat kabupaten dan lainnya faktor-faktor, seperti distribusi ukuran tanah, yang secara bersama-sama memengaruhi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Shaohua Chen dan Martin Ravallion (2007) yang berjudul “Absolute Poverty Measures for The Developing World, 1981-2004” yang membahas mengenai perkiraan tentang ukuran kemiskinan absolut bagi Negara berkembang pada periode 1981-2004. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya penurunan persentase orang atau penduduk yang dinyatakan benar-benar miskin, walaupun upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ini belum maksimal dan belum merata di berbagai wilayah. Peneliti menemukan hal lain yang lebih berpengaruh dalam mengurangi jumlah penduduk atau orang miskin

di Negara berkembang di luar Negara China. Adanya tanda-tanda kemajuan atau perkembangan yang baik dalam mengurangi penduduk miskin pada tahun 2000, yaitu dengan memberikan tunjangan atau upah yang lebih baik untuk biaya hidup yang lebih tinggi bagi penduduk miskin di perkotaan. Adanya urbanisasi di Negara berkembang ini lebih dominan dibandingkan dengan daerah yang lain, karena di Negara berkembang 52 hampir satu perempat orang miskin melakukan urbanisasi ke perkotaan dan tiga perempatnya tetap tinggal di daerah pedesaan.

D. Model Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai kerangka pikir penelitian agar memudahkan dan memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut adalah gambar kerangka pemikiran yang skematis :



E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara atas permasalahan dalam penelitian yang memerlukan pembuktian secara empiris lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

H₂: Diduga variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

H₃: Diduga variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.